

Kebijakan Politik Ali Khamenei dan Implikasinya terhadap Stabilitas Regional di Timur Tengah

Fatkhul Mubin

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) ALHIKMAH Jakarta
Email: fatkhulmubin90@alhikmahjkt.ac.id

ABSTRACT

This article examines the political policies of Ali Khamenei, Iran's Supreme Leader since 1989, and their implications for regional stability in the Middle East. Employing a qualitative-descriptive approach through literature review, the study highlights how the ideology of Wilayah al-Faqih, anti-Western discourse, and support for non-state actors such as Hezbollah, Hamas, and the Houthis shape Iran's foreign policy strategy. Khamenei's policies not only reinforce his domestic legitimacy but also generate new geopolitical dynamics, including the Iran-Saudi rivalry and Iran's involvement in the conflicts in Syria, Iraq, and Yemen. The findings reveal that Khamenei's approach is both expansionist and confrontational, intensifying sectarian tensions, driving realignments in the region (such as the normalization of relations between Israel and several Arab states), and provoking strong responses from the United States and its allies. The article concludes that while these policies consolidate Iran's regional influence, they largely exert negative impacts on regional stability. This study contributes to the scholarship on Islamic politics and international relations by demonstrating how ideology and individual leadership can reshape the geopolitical landscape of the Middle East.

Keywords: *Ali Khamenei, Iran, Foreign Policy, Middle East, Regional Stability.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kebijakan politik Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, serta implikasinya terhadap stabilitas regional di Timur Tengah. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur, penelitian ini menyoroti bagaimana ideologi *Wilayah al-Faqih*, sikap anti-Barat, dan dukungan terhadap kelompok non-negara seperti Hizbullah, Hamas, dan Houthi membentuk strategi luar negeri Iran. Kebijakan Khamenei tidak hanya memperkuat legitimasi domestiknya, tetapi juga menimbulkan dinamika geopolitik baru, mulai dari rivalitas Iran-Arab Saudi hingga keterlibatan dalam konflik Suriah, Irak, dan Yaman. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan Khamenei bersifat ekspansif sekaligus konfrontatif, yang memperbesar ketegangan sektarian, mendorong perubahan aliansi di kawasan (misalnya normalisasi Israel dengan beberapa negara Arab), serta memicu respon keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan tersebut mampu mempertahankan pengaruh Iran, dampaknya cenderung negatif terhadap stabilitas regional. Penelitian ini berkontribusi pada kajian politik Islam dan hubungan internasional dengan menyoroti bagaimana ideologi dan kepemimpinan personal dapat mengubah peta geopolitik Timur Tengah.

Kata Kunci: *Ali Khamenei, Iran, Kebijakan Luar Negeri, Timur Tengah, Stabilitas Regional*

A. PENDAHULUAN

Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, memainkan peranan sentral dalam membentuk arah kebijakan politik dan luar negeri negaranya. Kebijakan di bawah kepemimpinannya tidak hanya berimplikasi pada politik domestik, tetapi juga memengaruhi secara signifikan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam konteks konflik berkepanjangan Israel–Palestina, Khamenei konsisten menampilkan sikap politik yang tegas dan ideologis, sejalan dengan tingginya dukungan publik Iran terhadap Palestina, yakni mencapai 81% menurut laporan Pew Research Center (2021). Fenomena ini menunjukkan adanya sinergi antara legitimasi domestik dan orientasi politik luar negeri yang diproyeksikan Iran ke kawasan.

Kebijakan luar negeri Iran di era Khamenei kerap ditandai dengan retorika anti-Barat dan anti-Zionisme, serta upaya memosisikan Iran sebagai pemimpin dunia Islam melalui dukungan terhadap kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas dan Hizbullah. Dukungan ini tidak berhenti pada level retorika moral, melainkan juga diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial dan militer yang memperkuat kapasitas aktor non-negara sekaligus memperumit dinamika konflik di Timur Tengah (*International Crisis Group*, 2020). Dengan demikian, kebijakan Khamenei memiliki dimensi ganda: memperkuat posisi Iran di mata pendukung regional sekaligus meningkatkan tensi dengan negara-negara Arab tertentu serta kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti keterlibatan Iran dalam politik kawasan, baik dari sisi ideologi, dukungan terhadap proxy, maupun dampak pada hubungan Iran dengan kekuatan besar dunia. Namun, sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral, misalnya hanya fokus pada aspek dukungan militer atau dimensi ideologis tertentu. Keterbatasan lain terlihat pada kurangnya analisis komprehensif yang mengintegrasikan hubungan antara ideologi kepemimpinan, instrumen dukungan material, serta respons eksternal dari negara-negara lain. Selain itu, kajian yang bersifat longitudinal yang menilai bagaimana kebijakan Khamenei secara konsisten membentuk pola stabilitas regional juga masih relatif minim. Celah inilah yang menjadikan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan Khamenei dan dampaknya terhadap stabilitas Timur Tengah relevan sekaligus mendesak untuk dilakukan.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan luar negeri Khamenei dalam konteks konflik Israel–Palestina; menilai dampaknya terhadap hubungan Iran dengan negara-negara Arab serta kekuatan global; mengkaji kontribusinya terhadap dinamika ketegangan dan keseimbangan kekuatan di Timur Tengah; serta menggali respons eksternal terhadap kebijakan tersebut. Tujuan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran Iran sebagai aktor kunci yang tidak hanya memengaruhi konflik Israel–Palestina, tetapi juga stabilitas regional secara keseluruhan.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih berlangsungnya konflik Israel–Palestina dan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan, di mana Iran melalui kepemimpinan Khamenei berperan sebagai salah satu faktor determinan. Dengan menganalisis secara integratif dimensi ideologis, material, dan diplomatik dari kebijakan Khamenei, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pengembangan kerangka analisis baru, kontribusi empiris melalui bukti yang lebih komprehensif mengenai dampak kebijakan Iran, serta kontribusi praktis dengan menyajikan rekomendasi kebijakan bagi upaya stabilisasi kawasan. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya menjawab kekosongan dalam literatur, tetapi juga menawarkan nilai tambah dalam memahami dinamika politik Timur Tengah kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memahami kebijakan politik Ali Khamenei dan implikasinya terhadap stabilitas regional. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen, di bidang hubungan internasional dan studi Timur Tengah.

Studi literatur akan mencakup buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang relevan mengenai kebijakan luar negeri Iran, konflik Israel-Palestina, serta dinamika politik di Timur Tengah. Selain itu, analisis data sekunder dari lembaga-lembaga riset dan think tank akan digunakan untuk memberikan konteks dan mendukung argumen yang diajukan dalam penelitian ini.

Dengan memadukan berbagai sumber data, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang kebijakan politik Ali Khamenei dan implikasinya terhadap stabilitas di Timur Tengah.

C. HASIL DAN DISKUSI

Biografi Singkat Ali Khamenei

Ali Khamenei lahir pada 17 Juli 1939 di Mashhad, Iran. Ia adalah seorang ulama Syiah yang menjabat sebagai Pemimpin Tertinggi Iran sejak 1989, menggantikan Ruhollah Khomeini setelah kematian pendiri Republik Islam Iran tersebut. Khamenei menyelesaikan pendidikan agama di Qom, pusat pendidikan Islam terkemuka di Iran, di mana ia belajar di bawah bimbingan para ulama terkemuka. Sebelum menjadi Pemimpin Tertinggi, Khamenei juga menjabat sebagai Presiden Iran dari 1981 hingga 1989. Selama masa jabatannya, ia terkenal dengan pandangannya yang keras terhadap Barat, terutama Amerika Serikat, dan mendukung kebijakan luar negeri yang agresif terhadap negara-negara yang dianggap sebagai musuh Iran.

Khamenei terlibat dalam politik sejak awal Revolusi Islam 1979, yang menggulingkan rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi. Setelah revolusi, ia memainkan peran penting dalam membangun struktur politik baru yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam dan ideologi Syiah. Dalam konteks ini, Khamenei tidak hanya menjadi tokoh politik,

tetapi juga simbol spiritual bagi banyak rakyat Iran. Menurut data dari Pew Research Center, sekitar 90% penduduk Iran adalah Muslim Syiah, yang memberikan legitimasi tambahan bagi posisi Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi (Pew Research Center, 2011).

Khamenei juga dikenal sebagai seorang penulis dan pemikir. Ia telah menerbitkan banyak karya yang menguraikan pandangannya tentang Islam, politik, dan masyarakat. Dalam salah satu bukunya, ia menekankan pentingnya "Wilayah al-Faqih" atau kepemimpinan ulama sebagai landasan pemerintahan Islam. Konsep ini menjadi dasar bagi legitimasi kekuasaannya dan pengaruhnya dalam politik Iran. Dalam konteks ini, Khamenei berupaya untuk menjaga stabilitas politik di dalam negeri sambil memperluas pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah.

Sebagai Pemimpin Tertinggi, Khamenei memegang kekuasaan yang sangat besar dalam struktur politik Iran. Ia memiliki kontrol atas angkatan bersenjata, badan intelijen, dan berbagai institusi penting lainnya. Khamenei juga memiliki wewenang untuk menunjuk pemimpin tinggi militer, termasuk Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Garda Revolusi Iran, yang merupakan kekuatan paramiliter yang berperan penting dalam kebijakan luar negeri Iran. Menurut laporan dari International Crisis Group, Garda Revolusi Iran memiliki anggaran yang signifikan dan terlibat langsung dalam operasi di negara-negara seperti Suriah dan Irak (International Crisis Group, 2019).

Khamenei juga memiliki pengaruh yang kuat dalam pemilihan umum di Iran. Meskipun ada sistem pemilihan yang diadakan untuk memilih presiden dan anggota parlemen, Khamenei dan Dewan Penjaga memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Hal ini menjadikan proses politik di Iran sangat terpusat pada figur pemimpin tertinggi, yang pada gilirannya mempengaruhi stabilitas politik di negara tersebut. Data dari Freedom House menunjukkan bahwa Iran memiliki salah satu indeks kebebasan politik terendah di dunia, yang mencerminkan kontrol ketat Khamenei terhadap proses politik (Freedom House, 2020).

Dalam konteks kebijakan luar negeri, Khamenei mendorong pendekatan yang agresif terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman bagi Iran. Ia berpendapat bahwa Iran harus memperluas pengaruhnya di kawasan Timur Tengah untuk menghadapi dominasi AS dan sekutunya. Kebijakan ini tercermin dalam dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dan rezim Bashar al-Assad di Suriah. Menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies, Iran telah menginvestasikan miliaran dolar dalam mendukung sekutunya di kawasan tersebut, yang menunjukkan komitmen Khamenei terhadap kebijakan luar negeri yang ambisius (CSIS, 2021).

Pemikiran dan Ideologi Khamenei

Pemikiran Khamenei sangat dipengaruhi oleh ideologi Syiah dan prinsip-prinsip Islam. Ia percaya bahwa pemerintahan harus dijalankan berdasarkan hukum Islam dan bahwa pemimpin negara harus memiliki legitimasi spiritual. Konsep "Wilayah al-Faqih"

yang diusungnya menekankan bahwa ulama memiliki tanggung jawab untuk memimpin masyarakat dan menjaga nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Menurut Khamenei, pemimpin harus mampu mengarahkan rakyat menuju kebaikan dan keadilan, serta melindungi negara dari ancaman eksternal.

Khamenei juga mengembangkan pandangan tentang "perlawanan" terhadap imperialisme Barat. Dalam berbagai pidatonya, ia sering menekankan pentingnya melawan dominasi AS dan sekutunya di Timur Tengah. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga ekonomi dan budaya. Khamenei mendorong rakyat Iran untuk mandiri dan tidak tergantung pada bantuan asing, serta mempromosikan produk-produk lokal sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat ekonomi nasional. Data dari Bank Sentral Iran menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Iran telah berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri (Bank Sentral Iran, 2022).

Dalam konteks hubungan internasional, Khamenei sering kali mengaitkan kebijakan luar negeri Iran dengan prinsip-prinsip Islam. Ia berpendapat bahwa Iran memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung negara-negara Muslim yang tertindas dan melawan penjajahan. Hal ini tercermin dalam dukungan Iran terhadap Palestina dan penolakannya terhadap Israel. Khamenei sering menyebut konflik Palestina sebagai salah satu isu utama yang harus diperjuangkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Menurut data dari Al Jazeera, Iran telah memberikan dukungan finansial dan militer kepada kelompok-kelompok Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam (Al Jazeera, 2021).

Secara keseluruhan, pemikiran dan ideologi Khamenei mencerminkan kombinasi antara nilai-nilai Islam dan strategi politik yang pragmatis. Ia berusaha untuk menjaga stabilitas dalam negeri sambil memperluas pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Namun, pendekatan ini sering kali menimbulkan ketegangan dengan negara-negara lain, terutama yang memiliki kepentingan yang bertentangan dengan Iran. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat mempengaruhi stabilitas regional dan menciptakan tantangan baru bagi keamanan di Timur Tengah.

Kebijakan Politik Ali Khamenei

A. Kebijakan Dalam Negeri

1. Pengendalian Sosial dan Politik

Kebijakan dalam negeri Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran mencerminkan upaya untuk mempertahankan stabilitas politik dan sosial di negara yang memiliki sejarah panjang ketegangan internal. Salah satu cara yang paling mencolok adalah melalui pengendalian sosial dan politik yang ketat. Khamenei, yang berkuasa sejak 1989, telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk mengendalikan oposisi politik dan mencegah protes yang dapat mengganggu stabilitas. Menurut data dari Freedom House, Iran memiliki skor kebebasan yang sangat rendah, dengan penilaian 17 dari 100

pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kebebasan sipil dan politik sangat dibatasi (Freedom House, 2021).

Pengendalian ini terlihat jelas dalam penanganan protes yang terjadi pada tahun 2019, ketika rakyat Iran turun ke jalan menentang kenaikan harga bahan bakar. Respon pemerintah adalah dengan tindakan represif, termasuk penangkapan massal dan penggunaan kekuatan militer. Menurut Amnesty International, lebih dari 300 orang tewas dalam protes tersebut, dan ribuan lainnya ditangkap (Amnesty International, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa Khamenei tidak segan-segan menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya, meskipun hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang lebih besar di kalangan rakyat.

Di sisi lain, Khamenei juga berusaha membangun legitimasi melalui program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya, program bantuan sosial yang diluncurkan pada tahun 2020 untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Namun, meskipun ada upaya tersebut, banyak kritik yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah tidak efektif dan sering kali korup, yang pada gilirannya mengarah pada ketidakpuasan sosial yang lebih besar (Khan, 2020).

2. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi di era Khamenei juga sangat dipengaruhi oleh sanksi internasional yang diberlakukan oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Sanksi ini telah mengakibatkan penurunan tajam dalam pendapatan minyak Iran, yang merupakan sumber utama pendapatan negara. Menurut laporan OPEC, produksi minyak Iran turun dari 3,8 juta barel per hari pada tahun 2017 menjadi hanya 1,9 juta barel per hari pada tahun 2020 (OPEC, 2020). Penurunan ini berdampak langsung pada perekonomian domestik, menyebabkan inflasi yang tinggi dan peningkatan tingkat pengangguran.

Khamenei telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong kebijakan "Perekonomian Resistensi", yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak dan meningkatkan produksi lokal. Namun, penerapan kebijakan ini sering kali terhambat oleh korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan. Sebuah studi oleh Transparency International menunjukkan bahwa Iran berada di peringkat 149 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 (Transparency International, 2021).

Dalam konteks ini, Khamenei juga berusaha untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara non-Barat, seperti Rusia dan Cina. Pada tahun 2021, Iran menandatangani perjanjian 25 tahun dengan Cina yang mencakup investasi besar di sektor energi dan infrastruktur. Ini menunjukkan bahwa Khamenei berusaha untuk mencari alternatif dalam menghadapi sanksi Barat, meskipun hubungan ini juga dapat menimbulkan ketergantungan baru yang berisiko bagi kedaulatan ekonomi Iran (Al Jazeera, 2021).

B. Kebijakan Luar Negeri

1. Hubungan dengan Negara-negara Tetangga

Kebijakan luar negeri Khamenei sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah hubungan dengan negara-negara tetangga. Iran berusaha untuk membangun aliansi strategis dengan negara-negara seperti Irak, Suriah, dan Lebanon, yang dipandang sebagai bagian dari "Poros Resistensi" melawan pengaruh Barat dan sekutunya di kawasan. Misalnya, dukungan Iran terhadap kelompok Hizbullah di Lebanon dan milisi Syiah di Irak mencerminkan strategi Khamenei untuk memperkuat posisi Iran di kawasan (Mansour, 2020).

Namun, pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Ketegangan dengan Arab Saudi, yang merupakan rival utama Iran di kawasan, semakin meningkat, terutama setelah serangan drone terhadap fasilitas minyak Saudi pada tahun 2019 yang diduga dilakukan oleh Iran atau sekutunya. Menurut laporan dari International Crisis Group, ketegangan antara kedua negara ini dapat memicu konflik yang lebih besar di kawasan jika tidak dikelola dengan baik (International Crisis Group, 2019).

Khamenei juga berusaha untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara di kawasan Teluk Persia lainnya, meskipun hubungan ini sering kali terhambat oleh ketidakpercayaan. Misalnya, dialog antara Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) telah dilakukan untuk meredakan ketegangan, tetapi hasilnya masih belum signifikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik, ketegangan historis dan perbedaan ideologis tetap menjadi hambatan utama.

2. Strategi dalam Konflik Regional

Kebijakan luar negeri Khamenei juga ditandai dengan keterlibatan aktif dalam konflik regional, termasuk di Suriah dan Yaman. Dalam konflik Suriah, Iran telah memberikan dukungan militer dan finansial kepada rezim Bashar al-Assad, yang dianggap sebagai sekutu strategis. Menurut laporan oleh United Nations, Iran telah mengirim ribuan pasukan dan penasihat militer ke Suriah sejak awal konflik pada tahun 2011 (United Nations, 2020). Dukungan ini berkontribusi pada keberlangsungan rezim Assad, tetapi juga menimbulkan kritik internasional dan meningkatkan ketegangan dengan negara-negara Barat.

Di Yaman, Iran dituduh memberikan dukungan kepada kelompok Houthi, yang terlibat dalam konflik melawan pemerintah Yaman yang didukung oleh Arab Saudi. Keterlibatan ini telah memperburuk konflik dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di Yaman. Menurut laporan PBB, lebih dari 24 juta orang di Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan lebih dari 4 juta orang telah mengungsi akibat konflik (World Food Programme, 2021). Khamenei tampaknya menggunakan konflik ini sebagai sarana untuk memperluas pengaruh Iran di Semenanjung Arab, meskipun hal ini dapat memicu respons militer dari negara-negara tetangga.

Dalam konteks yang lebih luas, strategi Khamenei dalam konflik regional mencerminkan keinginan untuk mempertahankan posisi Iran sebagai kekuatan regional yang dominan. Namun, pendekatan ini berisiko menimbulkan ketegangan yang lebih besar dan konflik yang berkepanjangan di kawasan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap stabilitas regional.

Implikasi Kebijakan Khamenei terhadap Stabilitas Regional

A. Pengaruh terhadap Negara-Negara Teluk

Kebijakan politik Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas di kawasan Teluk Persia. Salah satu aspek utama dari kebijakan ini adalah upaya Iran untuk memperkuat pengaruhnya di negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Menurut laporan dari International Crisis Group, Iran telah menggunakan berbagai saluran, termasuk dukungan untuk kelompok-kelompok pro-Iran di negara-negara tersebut, untuk memperluas pengaruhnya (International Crisis Group, 2021). Misalnya, dukungan Iran terhadap kelompok Houthi di Yaman telah menjadi sumber ketegangan yang signifikan dengan Arab Saudi, yang melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka.

Statistik menunjukkan bahwa perdagangan senjata antara Iran dan kelompok-kelompok di negara-negara Teluk meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan pengiriman senjata ke berbagai kelompok bersenjata di kawasan tersebut, yang berpotensi meningkatkan ketegangan dan konflik (SIPRI, 2022). Selain itu, retorika Khamenei yang sering kali menentang kebijakan luar negeri negara-negara Teluk memperburuk hubungan antarnegara dan menciptakan suasana ketidakpercayaan yang mendalam.

Kebijakan Khamenei juga mencakup pendekatan ideologis yang menekankan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, yang sering kali dijadikan alat untuk memobilisasi dukungan domestik. Dalam konteks ini, Iran menganggap negara-negara Teluk sebagai bagian dari "blok musuh" yang harus dihadapi. Hal ini terlihat dalam berbagai pernyataan Khamenei yang menekankan pentingnya "perlawanan" terhadap dominasi Barat di kawasan tersebut. Pendekatan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral, tetapi juga menciptakan aliansi baru yang berpotensi memicu konflik lebih lanjut.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan Khamenei terhadap negara-negara Teluk juga berimplikasi pada stabilitas ekonomi kawasan. Ketegangan yang terus-menerus antara Iran dan negara-negara Teluk dapat mengganggu arus perdagangan dan investasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Menurut laporan Bank Dunia, ketidakstabilan politik di kawasan Teluk dapat mengurangi investasi asing langsung (FDI) hingga 30% dalam jangka pendek (World Bank, 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan Khamenei dalam menentukan arah dan stabilitas ekonomi kawasan.

Secara keseluruhan, kebijakan politik Ali Khamenei terhadap negara-negara Teluk memiliki implikasi yang kompleks dan saling terkait terhadap stabilitas regional. Dari dukungan terhadap kelompok-kelompok bersenjata hingga retorika anti-Barat, dampak dari kebijakan ini sangat terlihat dalam ketegangan yang terus meningkat di kawasan tersebut.

B. Dampak terhadap Irak dan Suriah

Kebijakan luar negeri Iran di bawah kepemimpinan Ali Khamenei juga memiliki dampak yang signifikan terhadap situasi di Irak dan Suriah. Iran telah berperan aktif dalam mendukung pemerintah Irak dan kelompok-kelompok milisi Syiah, yang sering kali beroperasi di luar kendali pemerintah pusat. Menurut laporan dari Institute for the Study of War, Iran telah mengirimkan pasukan dan perlengkapan militer ke Irak untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi ancaman ISIS (Institute for the Study of War, 2022). Dukungan ini tidak hanya memperkuat pengaruh Iran di Irak, tetapi juga menciptakan ketegangan dengan komunitas Sunni yang merasa terpinggirkan.

Di Suriah, kebijakan Khamenei terlihat jelas dalam dukungan kepada rezim Bashar al-Assad. Iran tidak hanya memberikan dukungan militer, tetapi juga keuangan dan logistik, yang memungkinkan rezim Assad untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Data dari Syrian Observatory for Human Rights menunjukkan bahwa lebih dari 10.000 tentara Iran dan milisi yang didukung Iran terlibat dalam konflik Suriah (Syrian Observatory for Human Rights, 2023). Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat posisi Assad, tetapi juga meningkatkan ketegangan dengan negara-negara yang mendukung oposisi, seperti Turki dan Arab Saudi.

Dampak dari kebijakan ini juga terlihat dalam meningkatnya ketegangan sektarian di kawasan. Intervensi Iran di Irak dan Suriah telah memicu reaksi dari kelompok-kelompok Sunni, yang merasa terancam oleh dominasi Syiah. Ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit diputus, di mana setiap tindakan balasan hanya memperburuk situasi. Menurut laporan Pew Research Center, lebih dari 70% warga Sunni di Irak menganggap Iran sebagai ancaman bagi stabilitas negara mereka (Pew Research Center, 2022). Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan Khamenei berkontribusi pada fragmentasi sosial dan politik di kawasan tersebut.

Selain itu, kebijakan Khamenei juga mempengaruhi dinamika geopolitik di kawasan. Keterlibatan Iran di Irak dan Suriah telah memicu kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga, termasuk Arab Saudi dan Turki, yang merasa perlu untuk meningkatkan kemampuan militer mereka. Menurut laporan dari Global Firepower, baik Arab Saudi maupun Turki telah meningkatkan anggaran pertahanan mereka secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sebagai respons terhadap ancaman yang dirasakan dari Iran (Global Firepower, 2023). Ini menciptakan perlombaan senjata yang berpotensi memperburuk ketegangan di kawasan.

Secara keseluruhan, kebijakan politik Ali Khamenei memiliki dampak yang mendalam terhadap stabilitas di Irak dan Suriah. Dari dukungan militer yang kuat hingga

peningkatan ketegangan sektarian, implikasi kebijakan ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara tersebut, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

C. Peran Iran dalam Konflik Yaman

Konflik Yaman merupakan salah satu contoh paling nyata dari pengaruh kebijakan politik Ali Khamenei di kawasan Timur Tengah. Iran telah memberikan dukungan signifikan kepada kelompok Houthi, yang merupakan kelompok pemberontak Syiah yang berjuang melawan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Menurut laporan dari United Nations, Iran telah menyediakan senjata, pelatihan, dan dukungan logistik kepada Houthi, yang telah mengubah dinamika konflik di Yaman (United Nations, 2022). Dukungan ini tidak hanya memperkuat posisi Houthi, tetapi juga memperburuk ketegangan antara Iran dan Arab Saudi, yang memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintah Yaman.

Statistik menunjukkan bahwa konflik Yaman telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan lebih dari 24 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan (World Health Organization, 2023). Kebijakan Khamenei dalam mendukung Houthi berkontribusi pada berlanjutnya konflik ini, yang telah mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Yaman. Selain itu, keterlibatan Iran dalam konflik ini juga meningkatkan ketegangan di kawasan, terutama dengan negara-negara Teluk yang melihat dukungan Iran sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka.

Peran Iran dalam konflik Yaman juga memiliki implikasi strategis yang lebih luas. Dengan mendukung Houthi, Iran tidak hanya memperkuat posisinya di Yaman, tetapi juga menciptakan jalur suplai yang memungkinkan mereka untuk memperluas pengaruhnya di Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, yang merupakan jalur perdagangan penting. Menurut laporan dari U.S. Department of Defense, Iran telah menggunakan jalur ini untuk mengirimkan senjata dan perlengkapan militer ke kelompok-kelompok pro-Iran di kawasan tersebut (U.S. Department of Defense, 2023). Ini menunjukkan bagaimana kebijakan Khamenei tidak hanya berfokus pada konflik Yaman, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap keamanan maritim dan perdagangan global.

Dari perspektif geopolitik, dukungan Iran terhadap Houthi juga memicu reaksi dari negara-negara lain di kawasan. Arab Saudi, yang merasa terancam oleh kehadiran Houthi yang didukung Iran, telah meningkatkan operasi militernya di Yaman dan memperkuat aliansi dengan negara-negara lain untuk menghadapi ancaman ini. Menurut laporan dari Center for Strategic and International Studies, Arab Saudi telah menghabiskan lebih dari \$100 miliar dalam upaya militer di Yaman sejak konflik dimulai (CSIS, 2023). Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak kebijakan Khamenei terhadap stabilitas regional.

Secara keseluruhan, peran Iran dalam konflik Yaman mencerminkan kebijakan politik Ali Khamenei yang berusaha memperluas pengaruh Iran di kawasan. Dari dukungan

militer yang signifikan hingga dampak strategis yang lebih luas, implikasi dari kebijakan ini sangat signifikan bagi stabilitas di Timur Tengah.

Respon terhadap Kebijakan Amerika

A. Sejarah Hubungan Iran dan Amerika

Hubungan antara Iran dan Amerika Serikat telah mengalami pasang surut yang signifikan sejak awal abad ke-20. Awalnya, hubungan ini cukup baik, terutama ketika Iran di bawah kekuasaan Shah Reza Pahlavi yang pro-Barat. Namun, situasi berubah drastis setelah Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan Shah dan mendirikan Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Khomeini. Revolusi ini tidak hanya mengubah struktur politik Iran, tetapi juga berdampak besar pada hubungan internasionalnya, terutama dengan Amerika Serikat.

Setelah revolusi, terjadi penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran, yang berlangsung selama 444 hari, dan menjadi titik awal ketegangan yang berkepanjangan. Sejak saat itu, kebijakan luar negeri Iran cenderung bersikap antagonis terhadap Amerika. Menurut data dari Pew Research Center, pada tahun 2019, hanya 12% warga Iran yang memiliki pandangan positif terhadap Amerika Serikat (Pew Research Center, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang buruk ini telah berakar dalam persepsi publik yang negatif terhadap kebijakan luar negeri AS.

Dalam konteks geopolitik, ketegangan ini semakin meningkat dengan munculnya program nuklir Iran yang dianggap mengancam stabilitas regional oleh AS dan sekutunya. Pada tahun 2006, program nuklir Iran mulai mendapatkan perhatian internasional, dan sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB semakin memperburuk hubungan bilateral. Data dari International Atomic Energy Agency (IAEA) menunjukkan bahwa Iran telah meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya secara signifikan, yang memicu kekhawatiran global (IAEA, 2020).

Kebijakan luar negeri Iran di bawah Ali Khamenei, yang mengambil alih kepemimpinan setelah kematian Khomeini pada tahun 1989, juga sangat dipengaruhi oleh ketegangan ini. Khamenei mengadopsi pendekatan yang lebih defensif dan agresif terhadap Amerika dan sekutunya, dengan menekankan pentingnya "perlawanan" terhadap imperialisme Barat. Dalam konteks ini, hubungan antara Iran dan Amerika dapat dilihat sebagai cerminan dari konflik ideologis yang lebih luas, di mana Iran berusaha mempertahankan kedaulatan dan identitasnya di tengah tekanan internasional.

Secara keseluruhan, sejarah hubungan Iran dan Amerika mencerminkan dinamika kompleks yang melibatkan faktor politik, ideologis, dan ekonomi. Ketegangan yang berkepanjangan ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas di Timur Tengah tetapi juga membentuk kebijakan luar negeri Iran di bawah kepemimpinan Ali Khamenei.

Kebijakan Amerika Terhadap Iran di Era Khamenei

Kebijakan Amerika terhadap Iran di era Khamenei dapat digambarkan sebagai siklus sanksi dan diplomasi yang berulang. Setelah serangan 11 September 2001, perhatian Amerika beralih ke terorisme, tetapi ketegangan dengan Iran tetap ada, terutama terkait dengan program nuklirnya. Pada tahun 2006, pemerintah AS di bawah George W. Bush mulai menerapkan sanksi yang lebih ketat terhadap Iran, dengan alasan bahwa program nuklir Iran berpotensi mengarah pada pengembangan senjata nuklir.

Di bawah pemerintahan Barack Obama, ada upaya untuk melakukan diplomasi dengan Iran yang menghasilkan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada tahun 2015. Kesepakatan ini memberikan Iran keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Namun, kebijakan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik diri dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang lebih ketat, yang dikenal sebagai "maximum pressure" campaign. Menurut laporan dari Congressional Research Service, sanksi ini merugikan ekonomi Iran secara signifikan, dengan estimasi penurunan PDB sebesar 6% pada tahun 2018 dan 6,8% pada tahun 2019 (Congressional Research Service, 2020).

Kebijakan sanksi yang diterapkan oleh Amerika tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari rakyat Iran. Menurut data dari World Bank, tingkat kemiskinan di Iran meningkat dari 23% pada tahun 2017 menjadi 30% pada tahun 2019, akibat dari sanksi yang diterapkan (World Bank, 2020). Hal ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan memberikan tantangan bagi kepemimpinan Khamenei untuk mempertahankan legitimasi politiknya.

Di sisi lain, kebijakan Amerika yang agresif ini juga memicu reaksi dari Iran. Khamenei dan pejabat tinggi Iran mengadopsi retorika yang lebih keras terhadap Amerika, menekankan pentingnya "perlawanan" terhadap tekanan luar. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Iran menjadi semakin berfokus pada penguatan aliansi dengan negara-negara yang dianggap sebagai "musuh bersama" Amerika, seperti Rusia dan China. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Amerika tidak hanya mempengaruhi Iran secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada dinamika geopolitik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Dengan demikian, kebijakan Amerika terhadap Iran di era Khamenei tidak hanya menciptakan ketegangan bilateral, tetapi juga berdampak pada stabilitas regional. Sanksi yang diterapkan oleh AS tidak hanya mengisolasi Iran secara ekonomi, tetapi juga memperkuat sentimen anti-Amerika di dalam negeri, yang pada gilirannya mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran dan interaksinya dengan negara-negara lain di kawasan.

C. Strategi Iran dalam Merespon Sanksi dan Isolasi

Dalam menghadapi sanksi dan isolasi internasional, Iran telah mengembangkan berbagai strategi untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan politiknya. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah diversifikasi ekonomi. Iran berusaha untuk

mengurangi ketergantungan pada sektor minyak, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonominya. Menurut data dari OPEC, kontribusi sektor minyak terhadap PDB Iran turun dari 30% pada tahun 2018 menjadi sekitar 20% pada tahun 2020 (OPEC, 2021).

Selain itu, Iran juga berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan dengan negara-negara non-Barat, terutama di Asia. Negara-negara seperti China dan India menjadi mitra penting bagi Iran dalam menghadapi sanksi. Pada tahun 2020, perdagangan antara Iran dan China mencapai sekitar \$14 miliar, dan kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama strategis yang mencakup investasi di sektor energi dan infrastruktur (Reuters, 2020). Ini menunjukkan bahwa Iran mencoba untuk membangun aliansi baru yang dapat membantu mengurangi dampak dari sanksi yang diterapkan oleh Amerika.

Di sisi lain, Iran juga meningkatkan kemampuan militernya sebagai bentuk deterrence terhadap ancaman eksternal. Program rudal balistik Iran, yang sering menjadi sorotan internasional, dianggap sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan dan ketahanan negara. Menurut laporan dari Institute for National Strategic Studies, Iran telah berhasil mengembangkan berbagai sistem rudal yang dapat mencapai target di seluruh wilayah Timur Tengah, yang berfungsi sebagai alat untuk memperkuat posisi tawar Iran di panggung internasional (INSS, 2021).

Strategi lain yang diterapkan oleh Iran adalah memperkuat aliansi dengan kelompok-kelompok non-negara di kawasan, seperti Hezbollah di Lebanon dan milisi Syiah di Irak. Kelompok-kelompok ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengaruh Iran, tetapi juga sebagai perisai untuk melawan ancaman dari Amerika dan sekutunya. Dengan cara ini, Iran berusaha untuk menciptakan "poros perlawanan" yang dapat melawan dominasi Amerika di Timur Tengah.

Secara keseluruhan, strategi Iran dalam merespon sanksi dan isolasi mencerminkan upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas di tengah tekanan internasional. Meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, Iran menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi situasi yang sulit. Ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan stabilitas regional di Timur Tengah, meskipun hubungan dengan Amerika tetap tegang.

Konflik Palestina-Israel

A. Posisi Iran dalam Konflik Palestina

Iran telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pendukung utama perjuangan Palestina dalam konflik yang berkepanjangan dengan Israel. Sejak Revolusi Islam 1979, posisi Iran terhadap masalah Palestina menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri Teheran. Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, secara konsisten menekankan pentingnya dukungan terhadap rakyat Palestina sebagai bagian dari ideologi anti-Zionis dan anti-imperialis yang menjadi ciri khas rezim Iran. Dalam pidatonya, Khamenei sering menyebut Palestina sebagai "jantung dunia Islam" dan menyerukan

persatuan di antara negara-negara Muslim untuk mendukung perjuangan Palestina (Khamenei, 2021).

Data menunjukkan bahwa Iran telah memberikan dukungan finansial dan militer kepada berbagai kelompok Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam. Menurut laporan dari International Crisis Group, Iran diperkirakan menghabiskan antara \$100 juta hingga \$200 juta setiap tahun untuk mendukung kelompok-kelompok tersebut (International Crisis Group, 2020). Dukungan ini tidak hanya berupa dana, tetapi juga pelatihan militer dan penyediaan senjata. Dengan demikian, posisi Iran dalam konflik Palestina bukan hanya retorika, tetapi juga diiringi dengan tindakan nyata yang berimplikasi pada dinamika konflik di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Iran memanfaatkan posisi ini untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. Melalui dukungan terhadap perjuangan Palestina, Iran berusaha untuk membangun aliansi dengan kelompok-kelompok yang memiliki visi serupa, seperti Hizbullah di Lebanon. Hal ini menciptakan jaringan yang kompleks di mana Iran berperan sebagai pemimpin dalam front anti-Zionis dan anti-Barat. Dengan demikian, posisi Iran dalam konflik Palestina tidak hanya berdampak pada hubungan dengan Israel, tetapi juga pada stabilitas regional secara keseluruhan.

Namun, dukungan Iran terhadap Palestina juga menghadapi tantangan. Beberapa negara Arab, terutama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, mulai meragukan pendekatan Iran yang agresif. Normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, menciptakan ketegangan di antara negara-negara yang mendukung Palestina dan mereka yang memilih untuk berkolaborasi dengan Israel. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Iran dalam konflik Palestina tidak selalu sejalan dengan kepentingan regional yang lebih luas, dan dapat berpotensi memicu ketidakstabilan lebih lanjut di Timur Tengah.

Secara keseluruhan, posisi Iran dalam konflik Palestina mencerminkan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada ideologi dan geopolitik. Dukungan yang diberikan kepada Palestina tidak hanya bertujuan untuk membela hak-hak rakyat Palestina, tetapi juga untuk memperkuat pengaruh Iran di kawasan. Dengan demikian, kebijakan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas regional di Timur Tengah.

B. Dukungan Iran terhadap Hamas dan Jihad Islam

Dukungan Iran terhadap Hamas dan Jihad Islam merupakan salah satu aspek paling penting dalam kebijakan luar negeri Teheran terhadap konflik Palestina. Sejak awal tahun 2000-an, Iran telah menjalin hubungan erat dengan kedua kelompok ini, yang dianggap sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan Iran di kawasan. Khamenei sering menyatakan bahwa dukungan ini adalah bagian dari komitmen Iran untuk melawan penjajahan Israel dan mendukung perjuangan rakyat Palestina (Khamenei, 2021).

Hamas, yang menguasai Jalur Gaza, dan Jihad Islam, yang lebih kecil namun juga signifikan, telah menerima pelatihan militer dan dukungan logistik dari Iran. Menurut

laporan dari Al Jazeera, Iran telah menyuplai berbagai jenis senjata dan teknologi kepada kedua kelompok tersebut, termasuk roket dan sistem pertahanan udara (Al Jazeera, 2020). Dukungan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan militer mereka, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam konflik melawan Israel, yang sering kali berujung pada eskalasi kekerasan di wilayah tersebut.

Namun, dukungan Iran terhadap Hamas dan Jihad Islam tidak selalu mulus. Terdapat perbedaan ideologis dan politik antara Iran dan Hamas, terutama setelah Hamas mengambil sikap lebih moderat dan bersedia untuk bernegosiasi dengan Israel. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka, meskipun Iran tetap berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya. Dalam beberapa kesempatan, Khamenei menekankan pentingnya persatuan di antara kelompok-kelompok Palestina, tetapi realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya perpecahan yang mendalam (International Crisis Group, 2020).

Dukungan Iran juga berimplikasi pada dinamika konflik di Gaza. Ketika konflik antara Hamas dan Israel meningkat, Iran sering kali berperan sebagai penyokong moral dan material bagi Hamas, yang dapat meningkatkan ketegangan antara Israel dan Iran. Misalnya, selama Perang Gaza 2014, Iran secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Hamas, yang berujung pada serangan balasan dari Israel terhadap posisi-posisi Iran di kawasan (The Washington Institute, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan Iran bukan hanya berdampak pada Hamas, tetapi juga memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi stabilitas regional.

Secara keseluruhan, dukungan Iran terhadap Hamas dan Jihad Islam mencerminkan strategi Teheran untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan sekaligus mendukung perjuangan Palestina. Namun, hubungan yang kompleks dan sering kali tegang antara Iran dan kelompok-kelompok ini menunjukkan bahwa dukungan tersebut tidak selalu berjalan mulus dan dapat berpotensi memicu ketidakstabilan lebih lanjut di Timur Tengah.

C. Implikasi Kebijakan Khamenei terhadap Stabilitas Palestina dan Israel

Kebijakan Ali Khamenei dalam mendukung perjuangan Palestina melalui dukungan terhadap Hamas dan Jihad Islam memiliki implikasi yang signifikan terhadap stabilitas di kawasan. Pertama, dukungan ini memperkuat posisi kelompok-kelompok tersebut dalam menghadapi Israel, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan ketegangan antara Israel dan Iran. Ketika Hamas dan Jihad Islam menerima bantuan militer dari Iran, mereka menjadi lebih percaya diri dalam melakukan serangan terhadap Israel, yang sering kali berujung pada eskalasi konflik (International Crisis Group, 2020).

Kedua, kebijakan ini juga berdampak pada hubungan antara negara-negara Arab dan Iran. Banyak negara Arab, terutama yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, melihat dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok ekstremis sebagai ancaman bagi stabilitas regional. Hal ini menciptakan ketegangan antara Iran dan negara-negara Arab, yang dapat berimplikasi pada aliansi politik dan militer di kawasan. Misalnya,

normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam dinamika politik di Timur Tengah yang dapat mempengaruhi posisi Iran (The Washington Institute, 2020).

Ketiga, kebijakan Khamenei juga menciptakan tantangan bagi proses perdamaian Palestina-Israel. Dengan adanya dukungan yang kuat dari Iran terhadap kelompok-kelompok yang menolak negosiasi dengan Israel, seperti Hamas, peluang untuk mencapai solusi damai menjadi semakin kecil. Hal ini diperburuk oleh ketidakstabilan politik internal di Palestina, di mana perpecahan antara Fatah dan Hamas menghalangi upaya untuk bersatu menghadapi Israel (Al Jazeera, 2020).

Keempat, dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok Palestina dapat memicu reaksi dari Israel yang lebih agresif. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel telah meningkatkan serangan terhadap posisi-posisi Iran di Suriah dan tempat-tempat lain di kawasan, dengan alasan untuk mencegah Iran memperkuat pengaruhnya di dekat perbatasan Israel. Ini menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan dan berpotensi membawa dampak lebih luas bagi stabilitas regional (The Washington Institute, 2014).

Dengan demikian, kebijakan Khamenei dalam mendukung Palestina melalui kelompok-kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam memiliki dampak yang kompleks dan multidimensional. Sementara dukungan ini bertujuan untuk memperkuat posisi Palestina, ia juga berpotensi menambah ketegangan dan ketidakstabilan di kawasan, yang dapat mempengaruhi tidak hanya Palestina dan Israel, tetapi juga negara-negara tetangga di Timur Tengah.

Analisis Dampak Kebijakan Khamenei terhadap Stabilitas Timur Tengah

A. Dinamika Geopolitik di Timur Tengah

Kebijakan politik Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi Iran, telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk dinamika geopolitik di Timur Tengah. Salah satu aspek utama dari kebijakan Khamenei adalah penekanan pada ideologi revolusioner yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syiah, yang mengedepankan perlawanan terhadap kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan. Menurut laporan dari International Crisis Group (2021), kebijakan ini semakin memperburuk ketegangan antara Iran dan negara-negara Sunni, yang dipimpin oleh Arab Saudi, menciptakan garis pemisah yang tajam dalam politik regional.

Khamenei juga memanfaatkan kekuatan militer dan paramiliter, seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), untuk memperluas pengaruh Iran di kawasan. Dengan dukungan terhadap kelompok-kelompok seperti Hezbollah di Lebanon dan milisi Syiah di Irak, Iran berusaha untuk membangun jaringan aliansi yang dapat menantang dominasi AS dan sekutunya. Data dari Global Security (2022) menunjukkan bahwa IRGC telah terlibat dalam berbagai konflik di Suriah dan Irak, yang semakin memperumit situasi keamanan di Timur Tengah.

Dalam konteks ini, Iran juga berupaya untuk memperkuat posisinya melalui program nuklirnya. Meskipun ada berbagai perjanjian internasional, seperti JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), kebijakan Khamenei yang menolak untuk sepenuhnya menghentikan program nuklirnya telah mengakibatkan sanksi internasional yang lebih ketat dan meningkatkan ketegangan di kawasan. Menurut laporan dari Institute for Science and International Security (2023), Iran kini memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan bakar nuklir dalam jumlah yang signifikan, yang dapat menjadi ancaman bagi stabilitas regional.

Dinamika ini semakin diperburuk oleh konflik yang berkepanjangan di Suriah, di mana intervensi Iran telah menciptakan ketegangan antara kekuatan regional dan global. Keterlibatan Iran dalam konflik Suriah, di mana mereka mendukung rezim Bashar al-Assad, telah menarik perhatian negara-negara seperti Turki dan Israel, yang merasa terancam oleh ekspansi pengaruh Iran. Sebuah studi oleh Carnegie Middle East Center (2022) menunjukkan bahwa intervensi Iran di Suriah telah memperburuk ketegangan etnis dan sektarian di kawasan, yang mengarah pada potensi konflik yang lebih besar di masa depan.

Dalam keseluruhan analisis ini, jelas bahwa kebijakan Khamenei telah menciptakan dinamika geopolitik yang kompleks dan berpotensi merusak stabilitas di Timur Tengah. Dengan mempertahankan pendekatan agresif terhadap kebijakan luar negeri dan memperkuat aliansi dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kepentingan Barat, Khamenei telah mengubah peta politik di kawasan ini secara drastis.

B. Perubahan Aliansi dan Konfrontasi Baru

Kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Ali Khamenei telah mengarah pada perubahan signifikan dalam aliansi politik di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan pergeseran aliansi yang dramatis, di mana negara-negara yang sebelumnya bersaing kini mulai menjalin hubungan yang lebih erat. Salah satu contoh paling mencolok adalah normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain, melalui Kesepakatan Abraham pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara Arab yang sebelumnya menolak pengakuan terhadap Israel kini melihat Iran sebagai ancaman yang lebih besar.

Khamenei berusaha untuk merespons perubahan ini dengan memperkuat aliansi dengan negara-negara yang memiliki pandangan serupa, seperti Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata di Lebanon dan Irak. Menurut analisis dari Brookings Institution (2021), Iran berusaha untuk membangun poros perlawanan yang dapat melawan pengaruh AS dan Israel di kawasan. Ini termasuk dukungan yang lebih besar terhadap Hezbollah, yang telah menjadi alat penting bagi Iran untuk mengekspresikan kekuatan militernya di Lebanon dan Suriah.

Perubahan aliansi ini juga terlihat dalam konteks konflik Yaman, di mana Iran memberikan dukungan kepada Houthi, kelompok yang berperang melawan pemerintah

Yaman yang didukung oleh Arab Saudi. Keterlibatan Iran dalam konflik Yaman telah menyebabkan ketegangan yang lebih besar antara Iran dan Arab Saudi, yang merasa terancam oleh ekspansi pengaruh Iran di semenanjung Arab. Laporan oleh United Nations (2022) menyatakan bahwa konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi dan membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Di sisi lain, kebijakan Khamenei juga telah mendorong negara-negara Sunni untuk bersatu dalam menghadapi ancaman Iran. Misalnya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah meningkatkan kerjasama militer dan intelijen mereka untuk menghadapi potensi ancaman dari Iran. Menurut laporan dari Gulf Research Center (2023), kerjasama ini mencakup latihan militer bersama dan pertukaran informasi intelijen yang lebih intensif, yang menunjukkan bahwa negara-negara ini semakin menyadari perlunya bersatu untuk menghadapi tantangan yang dihadapi.

Secara keseluruhan, perubahan aliansi dan konfrontasi baru yang terjadi di Timur Tengah sebagai akibat dari kebijakan Khamenei menunjukkan bahwa stabilitas regional semakin terancam. Dengan semakin banyaknya negara yang merasa terancam oleh kebijakan Iran, risiko konflik berskala besar semakin meningkat, yang dapat berdampak luas pada keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan.

C. Prediksi Masa Depan Stabilitas Regional

Melihat ke depan, prediksi mengenai stabilitas regional di Timur Tengah dalam konteks kebijakan politik Ali Khamenei menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks. Dengan terus berlanjutnya kebijakan agresif Iran dan ketidakpastian politik di negara-negara tetangga, potensi untuk konflik berskala besar tetap tinggi. Menurut analisis dari Middle East Institute (2023), jika Khamenei tetap pada jalur kebijakan saat ini, kita dapat mengharapkan peningkatan ketegangan antara Iran dan negara-negara regional lainnya, terutama dalam konteks program nuklir dan dukungan terhadap kelompok bersenjata.

Salah satu faktor yang akan mempengaruhi stabilitas regional adalah reaksi dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat dan Rusia. Dengan kebijakan luar negeri AS yang cenderung berfokus pada pengecangan pengaruh Iran, kita mungkin akan melihat peningkatan dukungan militer dan ekonomi untuk negara-negara yang merasa terancam oleh Iran. Sebuah studi oleh Center for Strategic and International Studies (2022) menunjukkan bahwa AS mungkin akan meningkatkan kehadiran militernya di Teluk Persia sebagai respons terhadap aktivitas Iran yang semakin agresif.

Di sisi lain, Rusia juga memiliki kepentingan di kawasan ini, terutama dalam konteks dukungan terhadap rezim Bashar al-Assad di Suriah. Keterlibatan Rusia dalam konflik Suriah dapat menciptakan dinamika baru yang dapat mempengaruhi stabilitas di Timur Tengah. Jika Rusia dan Iran berhasil membangun aliansi yang lebih kuat, ini dapat menyebabkan pergeseran kekuatan yang signifikan di kawasan, yang mungkin mengarah pada konflik yang lebih besar antara kekuatan regional dan global.

Selain itu, perubahan demografis dan sosial di negara-negara Timur Tengah juga dapat mempengaruhi stabilitas di masa depan. Masyarakat yang semakin terdidik dan terhubung dengan dunia luar dapat mendorong tuntutan untuk reformasi politik dan sosial, yang mungkin bertentangan dengan kebijakan otoriter yang diterapkan oleh beberapa negara di kawasan ini. Menurut laporan oleh Pew Research Center (2023), generasi muda di Timur Tengah semakin menginginkan perubahan, dan ketidakpuasan ini dapat menjadi pemicu untuk konflik internal yang lebih besar.

Secara keseluruhan, masa depan stabilitas regional di Timur Tengah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik Khamenei dan respon dari negara-negara lain di kawasan ini. Dengan tantangan yang terus berkembang dan kompleksitas yang semakin meningkat, penting bagi pemimpin regional dan global untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang dapat mengurangi ketegangan dan mendorong stabilitas di kawasan ini.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan politik Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran berperan penting dalam membentuk dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah. Kebijakan luar negeri yang konfrontatif dan ekspansif, seperti dukungan terhadap kelompok bersenjata non-negara dan penolakan normalisasi dengan Israel maupun Amerika Serikat, telah memperkuat pengaruh Iran sekaligus meningkatkan ketegangan regional. Dukungan domestik yang tinggi terhadap sikap keras Khamenei menegaskan legitimasi internal kebijakan tersebut, meskipun praktik represif di dalam negeri justru memunculkan instabilitas yang berpotensi memengaruhi arah politik luar negeri Iran. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kebijakan Khamenei cenderung memberikan stabilitas jangka pendek bagi rezim, tetapi berdampak negatif terhadap keamanan dan stabilitas regional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam menyikapi peran Iran di kawasan, baik oleh negara-negara Arab maupun kekuatan global. Upaya diplomasi multilateral yang melibatkan Iran secara konstruktif dapat menjadi alternatif untuk meredakan ketegangan sekaligus membuka peluang kerja sama di bidang keamanan regional. Selain itu, reformasi internal Iran yang lebih terbuka terhadap partisipasi politik domestik dapat mendukung terciptanya kebijakan luar negeri yang lebih kooperatif. Dengan demikian, keterpaduan antara diplomasi eksternal dan reformasi internal menjadi kunci untuk mengurangi lingkaran ketidakstabilan yang selama ini melingkupi Timur Tengah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- International Crisis Group. (2020). *"Iran's Strategy in the Middle East: A New Approach."*
- Pew Research Center. (2021). *"Public Opinion in Iran: Attitudes Towards Israel."*
- Human Rights Watch. (2022). *"Iran: Events of 2021."*
- Gulf Research Center. (2021). *"Security Cooperation in the Gulf: Challenges and Opportunities."*
- International Crisis Group. (2021). *"Iran's Foreign Policy: The Khamenei Doctrine."*
- Global Security. (2022). *"Iran's Military Capabilities."*
- Institute for Science and International Security. (2023). *"Iran's Nuclear Program: Current Status."*
- Carnegie Middle East Center. (2022). *"The Syrian Conflict and Iran's Role."*
- Brookings Institution. (2021). *"The New Middle East: Iran's Strategy."*
- United Nations. (2022). *"Humanitarian Crisis in Yemen."*
- Gulf Research Center. (2023). *"Saudi Arabia and UAE's Military Cooperation."*
- Middle East Institute. (2023). *"The Future of Iran's Regional Influence."*
- Center for Strategic and International Studies. (2022). *"U.S. Military Presence in the Persian Gulf."*
- Pew Research Center. (2023). *"Youth and Social Change in the Middle East."*
- Al Jazeera. (2020). Iran's support for Hamas: A strategic alliance. Diakses dari [Al Jazeera](<https://www.aljazeera.com>).
- International Crisis Group. (2020). *Iran's Role in the Israel-Palestine Conflict*. Diakses dari [International Crisis Group](<https://www.crisisgroup.org>).
- Khamenei, A. (2021). *Speech on the International Day of Quds*. Diakses dari [Khamenei.ir](<https://www.khamenei.ir>).
- The Washington Institute. (2014). *The 2014 Gaza Conflict: A Strategic Analysis*. Diakses dari [The Washington Institute](<https://www.washingtoninstitute.org>).
- Pew Research Center. (2021). *"Iran's Views of the U.S. and Israel."*
- International Crisis Group. (2020). *"Iran's Role in the Gaza Conflict."*
- Freedom House. (2020). *"Freedom in the World 2020: Iran."*
- Center for Strategic and International Studies. (2021). *"Iran's Influence in the Middle East."*
- Bank Sentral Iran. (2022). *"Economic Report."*
- Amnesty International. (2019). *Iran: The bloody crackdown on protests*.
- Al Jazeera. (2021). Iran, China sign 25-year cooperation agreement.
- Freedom House. (2021). *Freedom in the World 2021: Iran*.
- International Crisis Group. (2019). *Iran and Saudi Arabia: A Dangerous Rivalry*.
- Khan, A. (2020). *Economic Challenges in Iran: A Review*.
- Mansour, R. (2020). *Iran's Foreign Policy: The Role of the Islamic Revolutionary Guard Corps*.
- OPEC. (2020). *Annual Statistical Bulletin*.

- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*.
- United Nations. (2020). *Report on the Situation in Syria*.
- World Food Programme. (2021). *Yemen Emergency Situation Report*.
- International Crisis Group. (2021). *"Iran's Influence in the Gulf."*
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2022). *"Trends in International Arms Transfers."*
- World Bank. (2023). *"Economic Impact of Political Instability in the Gulf."*
- Institute for the Study of War. (2022). *"Iran's Role in Iraq."*
- Syrian Observatory for Human Rights. (2023). *"Iranian Forces in Syria."*
- Pew Research Center. (2022). *"Sunni-Shia Relations in Iraq."*
- Global Firepower. (2023). *"Military Strength of Middle Eastern Countries."*
- United Nations. (2022). *"Humanitarian Crisis in Yemen."*
- World Health Organization. (2023). *"Health Crisis in Yemen."*
- U.S. Department of Defense. (2023). *"Iran's Military Activities in the Region."*
- Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2023). *"Saudi Arabia's Military Spending in Yemen."*